BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

RENCANA STRATEGIS

PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL
BARESKRIM POLRI

TAHUN 2020 – 2024

KEPUTUSAN KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
NOMOR: KEP/05/II/2021 TANGGAL 2 FEBRUARI 2021

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL POLRI
Nomor: Kep/ 05 /II/2021/Pusiknas

Tentang

RENCANA STRATEGIS
PUSIKNAS BARESKRIM POLRI TA. 2020-2024

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk kebutuhan operasional Satker Pusiknas Bareskrim Polri selama 5 (lima) tahun kedepan, dipandang perlu menetapkan Rancangan Rencana Strategis Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2020 - 2024.

Mengingat : 1 Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 Pasal 15 Ayat (1) huruf j yang menjelaskan bahwa "Guna melaksanakan tugas pokoknya, Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional";

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 5 Mei 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran XVIII : Bareskrim Polri);

4. Surat .....

4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA- 060.01.1.678164/2021 tanggal 23 Nopember 2020 tentang DIPA Pusiknas Bareskrim Polri T.A. 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1 Rencana Strategis Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan rencana pengembangan Satker Pusiknas Bareskrim Polri untuk 5 (lima) tahun yang akan datang dalam menyusun/melaksanakan kegiatan yang realistis berdasarkan kebijakan yang ditentukan dengan dukungan anggaran yang ada.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Februari 2021

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :
1. Kabareskrim Polri
2. Irwasum Kapolri
3. Asrena Kapolri
4. Karorenmin Bareskrim Polri

DAFTAR ISI

BAB		Halaman
I	**PENDAHULUAN**	
	1. Kondisi Umum	1
	2. Capaian Kinerja Pusiknas Bareskrim Polri Pada Renstra 2015-2019	3
	3. Potensi Dan Permasalahan	6
II	**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**	
	1. Visi Pusiknas Bareskrim Polri	31
	a. Visi Polri	31
	b. Makna Visi Polri	31
	c. Visi Bareskrim Polri	31
	d. Makna Visi Bareskrim	32
	e. Visi Pusiknas Bareskrim Polri	32
	f. Makna Visi Pusiknas Bareskrim Polri	33
	2. Misi Pusiknas Bareskrim Polri	33
	a. Misi Polri	33
	b. Misi Bareskrim Polri	33
	c. Misi Pusiknas Bareskrim Polri	33
	3. Tujuan Pusiknas Bareskrim Polri	34
	a. Tujuan Polri	34
	b. Tujuan Bareskrim Polri	34
	c. Tujuan Pusiknas Bareskrim Polri	35
	4. Sasaran Strategi Pusiknas Bareskrim Polri	35
	a. Sasaran Strategi Polri	36
	b. Sasaran Strategi Bareskrim Polri	37
	c. Sasaran Pusiknas Bareskrim Polri	38
	5. Hubungan Sasaran Strategi dan Tujuan Pusiknas Bareskrim Polri	40
	6. Pentahapan Kebijakan Pusiknas Bareskrim Polri	41

III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PUSIKNAS BARESKRIM POLRI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri 43
2. Arah Kebijakan dan Strategi Bareskrim Polri 50
3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusiknas Bareskrim Polri 54
4. Kerangka Regulasi Pusiknas Bareskrim Polri 57
5. Kerangka Kelembagaan Pusiknas Bareskrim Polri 58

IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja Pusiknas Bareskrim Polri 62
2. Kerangka Pendanaan Pusiknas Bareskrim Polri 64

V PENUTUP

1. Kaidah Pelaksanaan 66
2. Autentifikasi Dan Distribusi 69

LAMPIRAN LAMPIRAN :

1. Kerangka Pendanaan Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2020 s.d 2024;
2. Rencana Kerja dan Anggaran Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2020 s.d 2024;
3. Rencana Kebutuhan Anggaran Pengadaan Materiil/Peralatan Sumber Pendanaan Rupiah Murni (RM).

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

RENCANA STRATEGIS
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL BARESKRIM POLRI
TAHUN 2020 - 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Pada tingkatan perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/Lembaga kedalam dokumen Renstranya masing-masing.

Sebagai .....

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ 05 /II/2021/PUSIKNAS
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

Sebagai salah satu penyelenggara fungsi pemerintah dan sebagai salah satu alat negara berdasarkan pada ketentuan dari Undang-undang Dasar 1945, Polri dalam menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan perlu untuk memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJPN, RPJMN serta lingkungan strategis dasi internal maupun eksternal. Dalam tujuan akhir dari Polri ini, maka Polri perlu menjabarkan arah kebijakan dan strategi ke dalam suatu dokumen, yakni Renstra, Renja, dan RKA, yang nantinya dokumen-dokumen tersebut akan diturunkan kepada masing-masing satker di dalam tubuh Polri.

Sebagaimana di jelaskan diatas, maka penyusunan Rencana Strategis Pusiknas Bareskrim Polri juga mempedomani penjabaran RPJMN tahap III sebagai kelanjutan dari program dan kegiatan yang sudah dan belum di capai sebagaimana di tetapkan dalam Undang – undang Nomor : 17 Tahun 2007 serta sebagai dasar penjabaran dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan tahap awal dari renstra tahap IV tahun pertama pada tahun 2020.

Dalam BAB I ini disajikan kondisi umum Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal Polri yang merupakan gambaran atas pecapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusiknas Bareskrim Polri pada periode sebelumnya (2015-2019). Dalam Renstra periode sebelumnya, terdapat dua tema utama yaitu, layanan informasi kriminal nasional yang dapat diakses melalui Sistem Piknas dan peningkatan/pencapaian hasil kinerja operasional Sistem CMIS.

Selain capaian-capaian yang diraih Pusiknas Bareskrim Polri, disadari bahwa upaya pencapaian visi dan misi Pusiknas Bareskrim Polri terdapat aspirasi dari masyarakat yang semakin dinamis. Aspirasi tersebut merupakan harapan *stakeholders* kepada Pusiknas Bareskrim Polri yang didapat dari hasil evaluasi Grand Strategi Polri yang dilakukan oleh Srena Mabes Polri. Salah satu hasil evaluasi tersebut adalah masih adanya dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh Polri secara umum.

Pusiknas Bareskrim Polri selaku Satker yang memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya.

2. Capaian Kinerja Pusiknas Bareskrim Polri Pada Renstra 2015-2019

Di dalam Renstra Pusiknas Bareskrim Polri 2015-2019, sasaran strategis Pusiknas Bareskrim Polri terdapat 2 sasaran. Pusiknas Bareskrim Polri telah menetapkan target kinerja untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis dan Program yang telah ditentukan. Pada akhir perencanaan, baik itu tahunan atau per lima tahunan, Pusiknas Bareskrim Polri melalukan evaluasi pengukuran kinerja untuk mengukur sejauh mana Sasaran Strategis yang ditetapkan tersebut sudah tercapai. Berikut ini akan dijabarkan sejauh mana keberhasilan Pusiknas Bareskrim Polri dalam hal layanan informasi kriminal nasional yang dapat diakses melalui sistem Piknas dan peningkatan/pencapaian hasil kinerja operasional sistem CMIS.

a. Terwujudnya layanan informasi kriminal nasional yang dapat diakses melalui Sistem Piknas

Pusat layanan informasi kriminal nasional merupakan sentra layanan informasi untuk melayani operasionalisasi sistem Piknas yang tergelar di kesatuan Polri, yang terdiri dari operasional pelayanan infokrimnas dan operasional informasi teknologi. Aplikasi pada sistem Piknas berfungsi sebagai sarana pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data untuk pembuatan berbagai laporan, statistik kriminal dan

lantas ....

lantas, analisis dan evaluasi kriminalitas dan lantas serta berfungsi mendukung administrasi penyidikan berbasis elektronik dan *on line* guna memudahkan pengarsipan dan pencarian data.

1) **Jumlah Satuan yang dapat menyajikan Informasi Kriminal Nasional**

Pada Tahun 2016 tercatat bahwa terdapat sekitar 32 Polda, 120 Polres dan 180 Polsek yang sudah dapat menyajikan informasi kriminal nasional. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 33 Polda, 225 Polres dan 250 Polsek yang sudah dapat menyajikan informasi kriminal nasional. Dari seluruh data sampai dengan 2019 terlihat bahwa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah Polda, Polres, dan Polsek yang dapat menyajikan informasi kriminal nasional. Berdasarkan data di atas, indikator jumlah satuan yang dapat menyajikan informasi kriminal nasional secara bertahap selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Selain itu capaian dari target jumlah Polda, Polrek dan Polsek mencapai 100%.

2) **Persentase Input Data LP melalui Sistem Piknas**

Hasil capaian kinerja terhadap persentase input data LP melalui Sistem Piknas pada tahun 2017 mencapai 100% lebih, namun pada tahun 2018 capaian hanya 6,7%. Kemudian pada tahun 2019 capaian kembali meningkat menjadi 66,78%. Terlihat pada tahun 2018 hingga 2019 target yang telah ditetapkan untuk indikator persentase input data LP melalui sistem Piknas belum tercapai.

Dari data yang sudah diperoleh maka perlu ditinjau kembali kendala dari proses input data LP melalui sistem Piknas. Pada tahun 2019 tecatat bahwa kendala dalam pencapaian target dikarenakan belum seluruh Polda mendapatkan pelatihan proses input data LP melalui sistem Piknas dan adanya beberapa wilayah yang memiliki kondisi jaringan internet yang masih lemah. Sehingga proses input data menjadi lambat.

3) Persentasi .....

3) **Persentase Input Data Penyelesaian Kasus Melalui Sistem Piknas**

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi Polri di bidang pelayanan publik sesuai amanah undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayan Publik, serta dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) mendesain suatu Sistem yang mampu memenuhi tuntutan transparasi informasi kriminal dengan Sistem informasi kriminal (Sistem Piknas). Saat ini aplikasi Sistem Piknas sudah beralih dari konsep *client server* menjadi konsep *web based* dengan harapan seluruh wilayah dari Tingkat Mabes Polri, Polda, Polres/ta/tro/tabes, Polsek dapat menginput data kriminal berupa LP maupun IDK.

Hasil capaian kinerja terhadap persentase input data penyelesaian kasus melalui sistem Piknas tercatat dari tahun 2018 hingga 2019 selalu mencapai target yang ditentukan.

b. **Terwujudnya peningkatan/pencapaian hasil kinerja operasional Sistem CMIS**

Disamping Sistem Informasi Kriminal Nasional (Sistem Piknas) di Pusiknas Bareskrim Polri juga tergelar Aplikasi *Case Management Intellegence Sistem* (CMIS) yaitu komputer yang dirancang khusus untuk mengolah data yang didapat selama proses investigasi, penyelidikan, penyidikan suatu kejahatan transnasional berlangsung dalam satu wadah yang terintegrasi dan terpusat, sehingga CMIS merupakan Sistem yang mampu menyimpan data, mengolah data, menganalisa data, dan semua data yang diinput dalam aplikasi ini juga terhubung satu sama lainnya.

Dari .....

Dari tahun ke tahun sesuai dengan Renstra periode sebelumnya, Pusiknas Bareskrim Polri selalu menargetkan jumlah dokumen analisa 14 jenis kejahatan *Trans Nasional Crime* sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan hasil kinerja operasional sistem CMIS.

3. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi Gangguan Keamanan

1) Perkembangan Aspek Kehidupan

a) Global

(1) Negara-negara internasional sangat siap dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Teknologi dimanfaatkan bahkan dikembangkan sehingga mendatangkan benefit bagi negaranya. Dalam hal pengelolaan keamanan negara, teknologi ini digunakan secara maksimal dalam mendukung kinerja aparatnya;

(2) Perkembangan teknologi negara-negara maju tersebut membawa pengaruh besar bagi Indonesia khususya dalam hal pemanfaatan teknologi. Sebagian besar teknologi tersebugt dikembangkan di negara-negara maju, dan Indonesia cenderung menjadi *buyer* atau pengguna. Hal ini terkait dengan teknologi dalam hal pemeriksaan barang buklti dan olah TKP yang Indonesia masih belum dapat mengembangkan sendiri, dan menggunakan teknologi dari negara-negara maju tersebut;

(3) Pengaruh .....

(3) Pengaruh ideologi radikal terhadap perkembangan terorisme global dalam dasawarsa terakhir masih terus menguat, di antaranya dengan menggunakan isu-isu agama guna mencapai tujuan-tujuan politiknya. Pengaruh jaringan terorisme global terhadap perkembangan jaringan terorisme di kawasan terlihat dengan adanya hubungan afiliasi dan bai'at (ikrar kesetiaan). Keikutsertaan para militan dari berbagai negara (*Foreign Terrorist Fighter* –FTF) dalam mendukung afiliasi al-Qaida dan Daesh di Suriah dan Irak menunjukkan pengaruh dan komunikasi yang terjalin cukup erat antar jaringan teroris lintas Kawasan;

(4) Perkembangan dunia industri 4.0 berkembang secara pesat, dengan menghasilkan pabrik cerdas (Artificial Intelligence). Perkembangan berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), membuat interaksi antarbangsa menjadi semakin cepat dan kompleks. Aspek kedaulatan dan upaya untuk mendapatkan keunggulan dalam ruang siber (cyberspace) memunculkan ancaman berdimensi siber yang dapat dilakukan baik oleh aktor negara maupun aktor non-negara atau bahkan memiliki dimensi proxy yang dilakukan oleh aktor non-negara dengan dukungan aktor-negara. Ancaman serangan siber dalam bentuk cyber-espionage (mata-mata) dan cyber-sabotage (sabotase) terhadap infrastruktur strategis berbasis informasi, sebagai ancaman utama bagi keamanan global, khususnya yang terkait dengan sistem digital.

Dalam .....

Dalam forum the Third Singapore International Cyber Week di Singapura, 18 September 2018, Menkopolhukam RI menyatakan bahwa kawasan ASEAN sebagai pengguna dunia maya besar sangat rentan terhadap ancaman siber;

(5) *Cybercrime* merupakan istilah kejahatan di dunia maya atau internet. Dari tahun ke tahun kejahatan ini memiliki kecenderungan meningkat baik dalam jumlah maupun variasi serangan yang semakin maju seiring perkembangan teknologi internet itu sendiri. Sehingga muncullah kejahatan baru di dunia internet atau new cybercrime. Sebagai contoh internet yang pada awalnya hanya dapat mengirimkan email dan pesan singkat, kejahatan yang muncul pada era tersebut juga hanya sebatas kejahatan bidang email dan pesan saja. Namun sekarang interenet telah di gunakan diberbagai bidang pekerjaan dan kehidupan di masyarakat, teknologi yang berkembang sudah begitu pesat, tidak hanya mengirim pesan melalui email bahkan sekarang ini gambar, video, data dapat di kirimkan dengan mudah dan cepat.

b) Regional

Perkembangan lingkungan strategis ditingkat regional juga mempengaruhi dinamika keamanan di Indonesia. Berbagai gejolak yang terjadi ditambah dengan permasalahan antar negara dalam skala regional, secara langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan situasi keamanan dalam negeri. Negara-negara di kawasan regional yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan Lingkungan Strategis di Indonesia adalah sebagai berikut:

(1) Kebijakan .....

(1) Kebijakan "*America First*" yaitu kebijakan Presiden Trump yang lebih berorientasi terhadap kepentingan AS, termasuk diantaranya adalah perang dagang dan anggaran pertahanan AS yang meningkat. Dampak kebijakan ini diantaranya pembatalan kesepakatan nuklir dengan Iran (JCPOA) yang justru bisa berdampak merugikan sekutu-sekutu AS sendiri yaitu negara-negara Uni Eropa (Prancis, Jerman) dan Inggris yang sangat membutuhkan impor migas Iran dalam rangka memenuhi kebutuhan keamanan energi nasional negara-negara tersebut;

(2) Krisis Rohingya menarik simpati masyarakat dunia, berbagai bantuan kemanusiaan mengalir dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tanggal 8 September 2018, Kepala Jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) di Den Haag, Fatou Bensouda mengatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat mengajukan yurisdiksi atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap minoritas Rohingya;

(3) Selain itu, isu terorisme menjadi perhatian utama dalam beberapa dasawarsa terakhir, khususnya pasca kekalahan Daesh atau ISIL di Irak dan Suriah yang sebelumnya telah menarik keterlibatan ribuan *Foreign Terrorist Fighter* (FTF – militan asing) dari berbagai negara. Kekalahan Daesh telah memicu kembalinya para militan asing ke negara-negara asalnya, termasuk ke Asia Tenggara sehingga berpotensi menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional;

(4) Kembalinya .....

(4) Kembalinya para militan asing tersebut menjadi ancaman utama di berbagai kawasan. Peristiwa Marawi 23 Mei s.d. 17 Oktober 2017, menjadi tonggak awal bagi pembentukan kerja sama yang lebih erat dalam menghadapi ancaman terorisme di Asia Tenggara. Dalam kaitan tersebut, kerja sama regional didorong untuk lebih aktif dalam mengantisipasi ancaman tersebut, sehingga melahirkan beberapa kerja sama minilateral, seperti *sub-regional meeting* dan forum beberapa negara-negara ASEAN. Sampai dengan saat ini, forum-forum tersebut telah membantu mendorong terciptanya kerja sama intelijen dan pertukaran informasi strategis, antara lain "365 *Online Intelligence Sharing Platform*" dan *Our Eyes Initiative*. Dalam perjalanannya, *Our Eyes Initiative* telah diajukan melalui serangkaian pertemuan baik di tingkat ASEAN *Defence Senior Officials Meeting Working Group* (ADSOM WG) dan ASEAN *Defence Ministers' Meeting* (ADMM) di Singapura sehingga diadopsi dalam sebagai bagian dari forum ADMM dengan nama ASEAN *Our Eyes*. Seluruh negara peserta *Our Eyes* menyetujui penggunaan *ASEAN Direct Communication Infrastructure* (ADI) sebagai media komunikasi *Our Eyes* serta pengintegrasian *365 Online Intelligence Sharing Platform*;

(5) Kawasan Asia Pasifik telah menjadi daya tarik bagi negara besar, dengan berbagai konsep geopolitik, geostrategi dan geoekonominya. Hal ini ditandai dengan China semakin agresif mengembangkan konsep BRI.

Konsep .....

Konsep BRI China beririsan dengan wilayah Indo-Pasifik, dimana China sudah membangun beberapa pelabuhan pada negara-negara di kawasan tersebut, diantaranya di Pakistan, Sri Lanka, Djibouti, dan Yunani. Investasi China juga telah masuk ke Indonesia hingga ke negara-negara Pasifik Selatan. Pada sisi lain, Amerika Serikat melalui konsep Indo-Pasifiknya, mencoba menghubungkan dua wilayah besar dunia yaitu Samudera Hindia dan Pasifik yang dilakukan dengan membangun infrastruktur untuk menghubungkan kawasan Indo-Pasifik, namun yang utama adalah untuk mengimbangi konsep *Belt and Road Initiatives* (BRI) yang diprakarsai China;

(6) Bagi Indonesia, sentralitas ASEAN dinilai sebagai penyeimbang keamanan di kawasan. Perdamaian dan stabilitas intra-kawasan ASEAN menjadi penting bagi kestabilan Indo-Pasifik. Selain itu, ruang maritim negara-negara ASEAN berperan bagi kelangsungan ekonomi negara-negara seperti Jepang, China, AS, dan banyak negara lain karena jalur sutra maritim yang melekat di Asia Tenggara. Diakui atau tidak, kawasan ASEAN merupakan "*Indo-Pacific Fulcrum*". Sebagaimana di Selat Malaka yang memiliki nilai strategis, sehingga beberapa negara seperti India, China dan Australia ingin berperan dalam pengamanan Selat Malaka. Apabila negara-negara di luar ASEAN dibiarkan terlibat dalam pengamanan jalur tersebut, maka hal ini dapat memicu persaingan militer dan bentrokan di Selat Malaka;

(7) Selanjutnya .....

(7) Selanjutnya, negara-negara Uni Eropa (UE) meluncurkan rencana alternatif yang diberi nama "Strategi Konektivitas Asia." Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan transportasi, digital, dan energi sambil mempromosikan standar lingkungan dan tenaga kerja;

(8) Wilayah perbatasan sebagai wilayah yang membatasi satu negara dengan dengan negara lain tidak saja berperan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara. Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis bagi suatu negara dalam mendukung keberhasilan pembangunan karena wilayah perbatasan tersebut menjadi representative nilai kedaulatan suatu negara. Bermula dari wilayah perbatasan akan mendorong perkembangan ekonomi, sosial budaya dan kegiatan masyarakat lainnya yang akan saling mempengaruhi antarnegara sehingga berdampak pada strategi keamanan negara dan tentunya sebagai manifestasi utama kedaulatan wilayah negara

(9) Pengamanan wilayah perbatasan sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pengamanan ini perlu dilakukan oleh lintas sektor, melibatkan beberapa instansi. Dari sektor keamanan dalam negeri, Polri memegang peranan penting di wilayah perbatasan. Namun, permasalahan yang sampai sekarang masih terjadi perlu untuk dicarikan solusi agar tidak mengganggu proses pengamanan wilayah perbatasan.

Sangat .....

Sangat diharapkan agar hal ini mendapatkan perhatian dari pemerintah karena mengingat isu perbatasan ini merupakan isu internasional.

c) **Nasional**

(1) **Kondisi geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam**.

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan sangat strategis dengan diapit dua benua dan dua samudera, serta memiliki empat choke point dari sembilan *choke point* dunia (jalur sempit perdagangan dunia), yaitu Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Lombok serta Selat Malaka. Indonesia juga berada tepat di lintas khatulistiwa, pertemuan tiga lempeng tektonik maupun jalur *the Pacific Ring of Fire* (Cincin Api Pasifik). Mengenai perbatasan, sampai saat ini proses penyelesaian perbatasan Indonesia dengan sepuluh negara tetangga belum tuntas (Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, India, Thailand, Palau, Australia, PNG dan RDTL). Secara geografis, Indonesia dengan posisi, kekayaan alam maupun permasalahannya, rawan terhadap perebutan pengaruh oleh negara-negara besar yang bersengketa, pelanggaran lintas batas, penyelundupan, penyebaran penyakit, pencurian kekayaan laut dan kejahatan *transnasional crime* yang cenderung meningkat terutama di perbatasan yang tidak terawasi. Selain itu memiliki kerawanan terhadap bencana alam seperti gunung berapi, gempa bumi, kebakaran, tsunami, banjir maupun tanah longsor.

(2) Ideologi .....

(2) Ideologi

(a) Ideologi yang merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu bangsa dan negara, karena di dalamnya terkadung nilai-nilai yang dapat digunakan dan dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, terutama bagi remaja yang merupakan generasi muda penerus bangsa. Ideologi seharusnya dapat menjadi filter yang mampu mengendalikan kehidupan remaja, terutama remaja yang tinggal di perkotaan dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi. Namun masih saja timbul berbagai permasalahan pada remaja perkotaan, lalu dimana peran dari ideologi sebagai pedoman kehidupan suatu bangsa dan sekaligus filter atau penyaring pengaruh dampak negatif dari luar;

(b) Ideologi yang ada pada suatu bangsa seharusnya dapat diketahui dan dipahami oleh para remajanya sebagai generasi peneruh bangsa tersebut. Ideologi dapat memberikan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terutama bagi Bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia sendiri. Seharusnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk bagi remaja sebagai generasi penerus bangsa dalam menjalani kehidupannya;

(c) Tingkat ....

(c) Tingkat pengetahuan dan pemahamanan remaja perkotaan terhadap ideologi khususnya ideologi bangsanya sendiri yakni Pancasila, dapat menjadi petunjuk atau pedoman bagi remaja perkotaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang positif serta relevan dengan kehidupan sehari-hari serta digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pengetahuan dan pemahaman remaja perkotaan terhadap ideologi yang mereka anut menjadi pedoman atau petunjuk bagi mereka dalam menjalakan kehidupan sehari-hari dan sebagai filter atau penyaring bagi mereka dalam menghadapi berbagai dampak dari globalisasi, terutama dampak negatifnya. Sehingga dapat dikatakan, antara ideologi, kehidupan remaja perkotaan, dan globalisasi sangatlah berhubungan erat dan salling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Pengetahuan dan pemahaman ideologi akan berdampak positif pada kehidupan remaja perkotaan jika di-implementasikan dengan baik, namun dapat dipengaruhi oleh dampak negatif dari globalisi, tetapi untuk mengahadapi dampak negatif dari globalisasi tersebut, remaja perkotaan memerlukan filter atau penyaring sekaligus pelindung, yaitu pengetahuan dan pemahaman menganai ideologi dan mengimplemtasikannya dalam kehidupan.

(d) Pancasila .....

(d) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia masih mendapat sorotan dan tentangan dari beberapa kelompok masyarakat dengan mengusung ideologi selain Pancasila, seperti khilafah Islamiyah, sosialisme, liberalism dan kapitalisme. Pancasila sebagai dasar negara akhir-akhir ini cenderung mengalami degradasi, akibat kebebasan dan keterbukaan yang tidak bertanggungjawab dan kurangnya pemahaman masyarakat. Pancasila saat ini hanya dianggap sebagai sesuatu yang simbolis dan seremonial, tanpa adanya pemahaman dan langkah nyata untuk mengimplementasikannya.

(3) Politik

(a) Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekwensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah RI dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan social dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia;

(b) Keberhasilan .....

(b) Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional dewasa ini. Di samping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung pula oleh penyelenggara negara yang professional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di dalam dan di luar negeri;

(c) Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Indonesia saat ini di bidang politik dalam negeri adalah adanya ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif); belum akomodatifnya konstitusi (UUD 1945) dan perundang-undangan yang ada terhadap dinamika perubahan masyarakat; rentannya konflik, baik vertikal maupun horizontal; menguatnya gejala disintegrasi bangsa yang sering kali mencari pembenaran dan dukungan dari pihak luar negeri tertentu; serta merebaknya berbagai tindak kekerasan dan aksi massa yang sering kali memaksakan kehendak.

Selain .....

Selain itu, permasalahan lain yang muncul sebagai akibat dari warisan sistem politik pada masa lalu adalah lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara negara, sehingga menjadi penyebab meluasnya tindakan KKN; belum terlaksananya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*); lemahnya kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara, dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia; serta belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan;

(d) Berkenaan dengan hubungan dan politik luar negeri, permasalahan pokok yang dihadapi adalah kekurangsiapan Indonesia dalam mengantisipasi berbagai ekses globalisasi politik dan ekonomi; dan lemahnya posisi tawar Indonesia dalam percaturan internasional. Di samping itu, Indonesia belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal guna memperkuat daya saing dalam menghadapi tantangan global serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesadaran politik rakyat.

(4) Ekonomi .....

(4) Ekonomi

(a) Menurut data BPS, perekonomian Indonesia meningkat 5,27 persen pada triwulan II-2018 dibandingkan dengan triwulan II-2017 (y-on-y). Serta Ekonomi Indonesia meningkat sebesar 4,21 persen di triwulan II-2018 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q);

(b) Hingga September 2018 penerimaan pajak mencapai Rp 900,82 triliun. Penerimaan pajak tumbuh 16,87% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 770,8 triliun. Kemudian, Bank Dunia merilis bahwa peringkat indeks kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia pada 2018 naik;

(c) Ekonomi Indonesia secara umum mengalami peningkatan namun di sisi lain masih terkena dampak negatif dari kondisi perekonomian global. Salah satu penyebabnya adalah sengketa perdagangan antara AS-China.

(5) Sosial Budaya

(a) Keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional untuk membangun bangsa.

Namun .....

Namun demikian pada sisi lain, keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai potensi konflik yang dapat menjadi pemicu desintegrasi bangsa;

(b) Kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik. Kuatnya pengaruh budaya dan gaya hidup barat yang masuk melalui tayangan media elektronik serta lemahnya regulasi media berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis telah membawa sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan norma-norma agama yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;

(c) Berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agama dapat menimbulkan pertentangan antarpemeluk agama itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik sosial. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh agama.

(6) Keamanan.....

(6) Keamanan

(a) Berbagai penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait dengan kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup membanggakan. Namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspadai karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas, antara lain terorisme, perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, kejahatan ekonomi lintas negara dan Indonesia juga rentan menerima gangguan keamanan dari aktor non-pemerintah seperti terorisme, penyelundupan Narkoba hingga tindak pidana perairan. pemerintah terus berupaya memerangi ancaman-ancaman tersebut;

(b) Pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan masih terkendala banyak hal. Masalah-masalah pelanggaran hukum, penciptaan ketertiban dan penegakan hukum di perbatasan perlu diantisipasi dan ditangani secara seksama. Luasnya wilayah, serta minimnya prasarana dan sarana telah menyebabkan belum optimalnya aktivitas aparat keamanan dan kepolisian. Keamanan negara di kawasan perbatasan saat ini perlu ditangani melalui penyediaan jumlah personil aparat keamanan dan kepolisian serta prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang memadai.

Keberadaan .....

Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di wilayah negara tetangganya. Disamping itu adanya sarana dan prasarana perbatasan akan mengurangi keluar-masuknya barang-barang illegal. Namun demian, jumlah sarana dan prasarana PLB, PPLB, dan CIQS di kawasan perbatasan masih minim;

(c) Permasalahan yang lain adalah sumber daya manusia keamanan yang belum memiliki kemampuan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan transnasional dan pelayanan untuk perempuan. Polsubsektor di wilayah perbatasan belum memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan, terutama untuk kasus-kasus berat yang melibatkan jaringan luas. Selain itu, Polsubsektor di wilayah perbatasan belum memiliki personil perempuan untuk menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum di wilayah perbatasan sehingga sering meminta bantuan ke instansi lain yang belum tentu juga memiliki kemampuan penegakan hukum dan penyidikan;

(d) Sebagian .....

(d) Sebagian jaringan teroris yang berkembang di Indonesia masih terus melakukan perekrutan dan pelatihan anggota-anggota baru. Kerjasama mereka dengan kelompok ekstrim di Philipina, seperti Abu Sayyaf dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Sementara itu, kelompok Jamaah Islamiyah (JI) khususnya dari elemen eks Afganistan sedang mengalami perpecahan bersamaan dengan menurunnya kredibilitas Abu Bakar Baasyir di kalangan JI karena dinilai tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anggotanya;

(e) Secara umum peringkat dan skor Indonesia dalam *Global Terrorism Index* (GTI) tahun 2014-2017 terus membaik seiring dengan upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, saat ini penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan gencar dilakukan melalui media sosial dan pesan instan. Sedangkan lima alat propaganda yang diidentifikasi paling sering digunakan di media sosial yaitu melalui video, forum diskusi (*chat rooms*), situs web (*websites*), gambar (*images*), dan tautan *web*, *retweets*, *likes* dan *hashtags*. Pada bulan Juli 2014, melalui media daring, ISIS meluncurkan video propaganda di Indonesia yang mengajak umat muslim Indonesia untuk memberikan kontribusi sumbangan baik fisik ataupun keuangan untuk ISIS. Video propaganda

Tersebut .....

tersebut diunggah, dibagikan, dan tersebar melalui media sosial dan pesan instan. Menurut perkembangannya, penyebaran paham radikal telah menyasar kelompok anak-anak dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh sekitar 40 perempuan dan 100 anak Indonesia dibawah umur 15 tahun telah menyebrang ke Suriah;

(f) Potensi gangguan Kamtibmas di calon Ibu Kota Negara baru dengan penduduk setempat terkait isu legalitas kepemilikan tanah dan resistensi masyarakat setempat terhadap pendatang.

b. Analisis SWOT

Sebagaimana dinamika perubahan lingkungan strategis yang telah dijelaskan diatas baik secara internal maupun eksternal, maka Pusiknas Bareskrim Polri harus melakukan upaya-upaya agar pengaruh lingkungan strategis tersebut dapat menjadi suatu peluang bukan ancaman yang dapat mempengaruhi peran kepolisian secara umum dan peran Pusiknas Bareskrim Polri secara khusus sebagai unit yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan sistem informasi kriminal nasional.

Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, menjadi dasar mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT untuk menentukan arah strategi dan kebijakan Pusiknas Bareskrim Polri kedepan. Adapun hasil analisa SWOT adalah sebagai berikut:

1) Kekuatan (Strengths)

a) Tugas Pusiknas Bareskrim Polri membina dan menyelenggarakan pembinaan fungsi sistem informasi kriminal nasional tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b) Postur kekuatan Pusiknas Bareskrim Polri sebagai pelaksana teknis bidang informasi kriminal nasional yang berada di bawah Kabareskrim Polri;

c) Dukungan terhadap sarana dan prasaranan yang meningkat dari tahun ke tahun baik peralatan operational teknis di bidang informasi dan peralatan operasional perkantoran;

d) Meningkatnya dukungan anggaran operasional pengelolaan sistem informasi kriminal nasional pada tiap tahunnya;

e) Terisinya jabatan pada sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Pusiknas Bareskrim Polri sesuai dengan yang dijabarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Polri semakin meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Pusiknas Bareskrim Polri;

f) Adanya tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel Pusiknas Bareskrim Polri telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melaksanakan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.

2) Kelemahan (Weaknesses)

a) Rasio perbandingan antara anggota Polri pada Pusiknas dan penduduk masih belum ideal;

b) Masih rendahnya keterampilan dan kemampuan personel Pusiknas di lapangan terutama dalam segi penguasaan sistem informasi;

c) Masih .....

c) Masih terbatasnya jumlah personel Polri yang berkualitas dan memiliki kompetensi/kemampuan dalam mengoperasionalkan Sistem Piknas maupun CMIS sehingga masih menggunakan tenaga konsultan IT;

d) Reformasi di bidang kultural belum menunjukan kemajuan yang optimal terlihat dari masih ada anggota Pusiknas Bareskrim Polri yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Pusiknas Bareskrim Polri;

e) Anggaran Pusiknas Bareskrim Polri belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran prioritas Pusiknas Bareskrim Polri apalagi untuk pemenuhan anggaran ideal Pusiknas Bareskrim Polri sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai serta mendukung belanja barang guna kegiatan operasional Pusiknas Bareskrim Polri, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal masih kurang sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materil yang dibutuhkan dalam pelayanan prima;

f) Perampingan struktur organisasi di kesatuan kewilayahan, mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah anggota yang sangat mempengaruhi kinerja operasionalisasi sistem Piknas dalam mengolah data informasi kriminal nasional.

3) Peluang .....

3) Peluang (Opportunities)

a) Program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), memberikan peluang bagi Bareskrim Polri untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Bareskrim Polri mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural;

b) Semakin terjalinnya hubungan lintas sektoral dengan instansi/lembaga terkait (*Partnership)* baik dalam negeri maupun luar negeri dalam mendukung kebijakan Sinergi Polisional Proaktif;

c) Adanya dukungan dari Legislatif (Komisi III DPR-RI), Eksekutif (Menkeu) dan Bappenas dalam upaya meningkatkan anggaran Polri dari tahun ke tahun;

d) Tugas operasional Pusiknas Bareskri Polri dalam mengelola data informasi kriminal nasional menjadi peluang bagi Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat (Trust Building) terhadap Polri.

4) Ancaman (Thearts)

a) Kecenderungan meningkatnya 4 (empat) jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi) serta penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin menganggu stabilitas dan keamanan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan tugas Pusiknas Bareskrim Polri;

b) Perkembangan .....

b) Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi disamping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, serta kecepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Pusiknas Bareskrim Polri untuk mampu menyajikan data secara valid;

c) Turbulensi gangguan keamanan dapat terjadi di setiap tempat dan setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya gangguan keamanan berimplikasi kontingensi di beberapa daerah tertentu serta penggunaan media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan *hoax* dan kebencian yang menganggu stabilitas dan keamanan nasional sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat;

c. Permasalahan

a. Polri dihadapkan pada berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga diperlukan sistem jaringan mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kriminal dan pelanggaran yang cepat, tepat guna dan akurat, aman dan akuntabel;

b. Proses Globalisasi dan kemajuan IPTEK juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya yang perlu diantisipasi;

c. Kinerja organisasi Polri dalam memberikan pelayanan Kamtibmas prima di era demokratisasi dan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Polri. Oleh karena itu peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri harus terus dilakukan penyempurnaan. Di sisi lain dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, perubahan *mind set* dan *cultur set* di lingkungan Polri terus dilakukan serta konsep kesejahteraan personel Polri menuju kinerja organisasi Polri lebih baik harus terus diperbarui;

d. Percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;

e. Media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan *hoax* dan ujaran kebencian yang menganggu stabilitas dan keamanan nasional;

f. Belum maksimalnya sinkronisasi data di lingkungan Polri terkait data Kriminalitas, data lalulintas, dan data gangguan kamtibmas;

g. Belum maksimalnya hubungan kerjasama eksternal Polri dalam rangka pemasukan data, pertukaran data kriminal nasional.

h. Pelayanan public kepolisian yang prima yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai komunitas terkecil di kewilayahan belum maksimal tergelar dan belum dapat diberdayakan secara efektif;

i. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih ada yang belum efektif apabila disandingkan dengan Analisa Beban Kerja (ABK), HTCK, serta struktur program dan anggaran yang ada sekarang ini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ 05 /II/2021/PUSIKNAS
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

BAB II
PENJABARAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PUSIKNAS BARESKRIM POLRI

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis SWOT sebagaimana disebutkan diatas, Pusiknas Bareskrim Polri menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi kriminal nasional secara *on line* dan analisis laporan yang berkaitan dengan kejahatan transnasional.

Dalam menyusun visi ini, hal pertama yang harus diperhatikan yaitu batas operasional dari visi itu sendiri, dimana dalam rumusan visi harus memberikan gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh organisasi pada akhir periode perencanaan. Selain itu, visi juga harus memberikan gambaran konsistensi kinerja organisasi selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dalam konteks perencanaan strategis, visi harus mendukung pencapaian visi dan misi Presiden terpilih yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Guna mendukung dan memastikan pencapaian visi dan misi presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, Polri menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Polri diarahkan pada penjabaran tugas dan fungsi Polri dalam mewujudkan visi dan misi Presiden yang dijabarkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Mengacu pada hal tersebut, maka visi, misi dan tujuan Polri, yaitu:

1. Visi Pusiknas Bareskrim Polri

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Renstra Lembaga merupakan penjabaran visi dari Lembaga tersebut dan di lengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden. Renstra Polri dalam hal ini sudah mengacu kepada aturan yang berlaku mengenai perumusan visi, dimana visi Polri harus memiliki keterkaitan dengan visi dan misi dari presiden terpilih. Berdasarkan hal-hal tersebut, Polri menetapkan visi yaitu:

a. Visi Polri:

"Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib".

b. Makna Visi Polri:

Terwujudnya Indonesia Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Visi Polri tersebut diatas kemudian harus dijabarkan ke visi dan misi Bareskrim Polri, sesuai dengan lingkup, kewenangan, dan fungsinya. Dalam merumuskan visi Bareskrim Polri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu visi Bareskrim Polri harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Bareskrim Polri, visi Bareskrim Polri juga harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Bareskrim Polri. Mengacu pada hal tersebut, visi Bareskrim Polri adalah sebagai berikut.

c. Visi Bareskrim :

"Terwujudnya penegakan hukum yang professional, modern, humanis, dan berkeadilan".

d. Makna .....

d. Makna Visi Bareskrim:

1) Profesional : dalam melakukan penegakan hukum, Bareskrim Polri harus memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan.
2) Modern: penegakan hukum didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, sehingga selalu mengikuti perkembangan zaman dalam hal melakukan proses penegakan hukum.
3) Berkeadilan : penegakan hukum dilakukan dengan tidak memandang bulu karena setiap masyarakat sama kedudukannya dimata hukum.

Visi Bareskrim Polri tersebut diatas kemudian harus dijabarkan ke visi dan misi Pusiknas Bareskrim Polri, sesuai dengan lingkup, kewenangan, dan fungsinya. Mengacu pada hal tersebut, visi Pusiknas Bareskrim Polri adalah sebagai berikut.

e. Visi Pusiknas Bareskrim Polri :

"Terwujudnya informasi kriminal nasional yang *valid* dan terpercaya."

f. Makna Visi Pusiknas Bareskrim:

1) Valid, informasi/data kriminal nasional pada system Piknas sesuai dengan fakta sesungguhnya terjadi, sehingga keabsahan informasi/data dapat di pertanggungjawabkan;
2) Terpercaya, dengan meningkatnya keakuratan informasi/data pada sistem Piknas, sehingga dapat dipercaya dan dijadikan rujukan data kriminal nasional.

2. Misi .....

2. Misi Pusiknas Bareskrim Polri

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam penyusunan misi Polri, sama halnya dengan perumusan visi Polri, bahwa batasan operasional menjadi hal yang harus diperhatikan. Misi harus memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Terkait dengan hal tersebut, maka misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas yang dibebankan oleh undang-undang terkait. Misi pun harus sejalan dengan upaya pencapaian visi dan berlaku pada periode tertentu. Oleh karena itu, misi Polri dijabarkan sebagai berikut:

"Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat".

Misi tersebut kemudian menjadi dasar bagi setiap satker dalam merumuskan misi dilingkungannya masing-masing, dengan menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bareskrim Polri kemudian menetapkan misi sebagai berikut:

a. **Mewujudkan kepastian hukum;**
b. **Menciptakan rasa keadilan dengan menjunjung tinggi HAM;**
c. **Penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.**

Mengacu kepada misi Polri dan Misi Bareskrim Polri, maka Pusiknas Bareskrim Polri menetapkan misi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. **Mewujudkan layanan data dan informasi kriminal nasional yang *valid* dan terpercaya;**
b. **Meningkatkan integrasi pertukaran data antar satker Polri, penegak hukum dan Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam penegakkan hukum.**

3. Tujuan Pusiknas Bareskrim Polri

Rumusan mengenai tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Tujuan Polri pada periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Polri:

1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
3) Mewujudkan Polri yang profesional;
4) Modernisasi pelayanan Polri;
5) Menerapkan manajemen Polri yang terintegritas dan terpercaya.

Dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan yang ditetapkan Polri, Bareskrim Polri sebagai bagian dari Satker dilingkungan Polri perlu untuk menjabarkan tujuan tersebut ke dalam dokumen renstra Bareskrim Polri. Sebagai bentuk upaya dalam menjabarkan tujuan Polri, Bareskrim Polri menjabarkan tujuan sebagai berikut:

b. Tujuan Bareskrim :

1) Meningkatnya penyelesaian tindak pidana, baik konvensional, transnasional, merugikan kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi;
2) Memberantas tindak pidana narkoba, korupsi, dan siber yang meresahkan masyarakat.
3) Menyelenggarakan tata kelola Bareskrim yang transparan, akuntabel dan professional.

Berikut .....

Berikut adalah tujuan yang disusun oleh Pusiknas Bareskrim Polri untuk mendukung pencapaian tujuan Polri dan Bareskrim Polri:

c. Tujuan Pusiknas Bareskrim Polri:

1) Pengembangan sistim big data terintegrasi menuju one data kriminal nasional;
2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi skala enterprise guna peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi krimina nasional;
3) Penguatan kerjasama internal dan eksternal Polri;
4) Pemanfaatan sistem teknologi analitis pemutakhiran untuk mendukung penegakan hukum;
5) Penetapan standardisasi data kriminal nasional;
6) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pusiknas Bareskrim Polri;
7) Peningkatan sarana dan prasarana Pusiknas Bareskrim Polri;
8) Reformasi kelembagaan dan birokrasi Pusiknas Barskrim Polri;
9) Penguatan akuntabilitas kinerja Pusiknas Bareskrim Polri;
10) Penguatan regulasi dan pengawasan Pusiknas Bareskrim Polri.

4. Sasaran Strategis Pusiknas Bareskrim Polri

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan oleh Pusiknas Bareskrim Polri, yang memberikan *outcome* dari program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pusiknas Bareskrim Polri. Untuk mencapai hal tersebut Pusiknas Bareskrim Polri menetapkan Sasaran Strategis yang diturunkan dari Sasaran Strategis Polri dan Sasaran Strategis Bareskrim Polri. Dalam merumuskan sasaran strategis di lingkungan Pusiknas Bareskrim Polri, ada beberapa kriteria yang ditetapkan, yaitu :

a. Sasaran Strategis Pusiknas Bareskrim Polri yang ditetapkan merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Pusiknas Bareskrim Polri;
b. Sasaran Strategis mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari program yang ada di Pusiknas Bareskrim Polri;

c. Sasaran .....

c. Sasaran Strategis Pusiknas Bareskrim Polri yang dirumuskan, selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan Polri, sesuai dengan tugas dan fungsi Bareskrim, dan tetap sesuai dengan Visi, Misi;

d. Sasaran Strategis Pusiknas Bareskrim yang dirumuskan memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan sasaran strategis Polri;

e. Sasaran Strategis Pusiknas Bareskrim dirumuskan dengan jelas dan terukur;

f. Sasaran Strategis Pusiknas Bareskrim dilengkapi dengan indikator dan target.

Berikut adalah sasaran setrategi Polri pada Renstra 2020-2024:

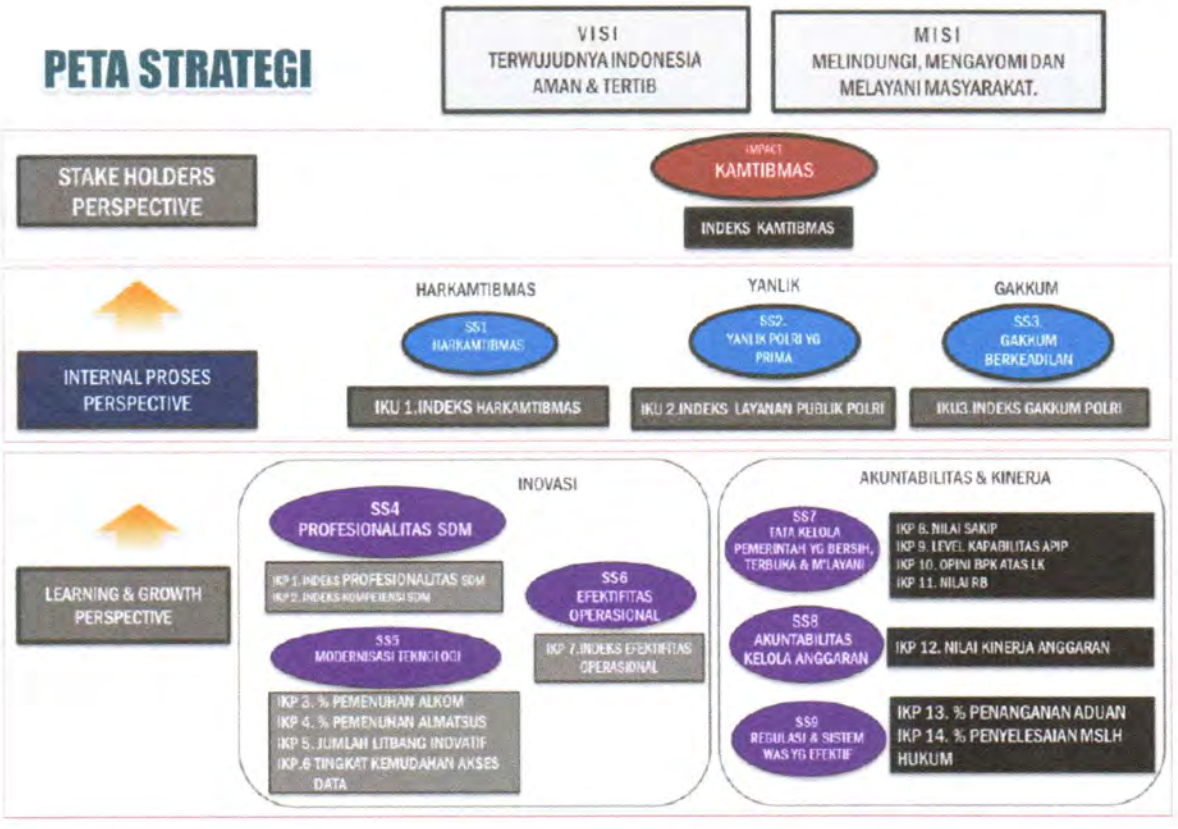

Impact (SI) yaitu "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", adalah:

1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2) Layanan publik Polri yang prima;
3) Penegakan hukum secara berkeadilan;
4) Profesionalisme SDM;
5) Modernisasi teknologi;
6) Efektifitas operasional;
7) Tata kelola pemerintah yang bersih, terbuka dan melayani;
8) Akutabilitas pengelolaan anggaran;
9) Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif.

Mengacu kepada sasaran Impact (SI) yaitu, "Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan", maka sasaran strategis Bareskrim 2020-2024 adalah:

a. Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan;
b. Meningkatnya pelayanan publik dalam penegakan hukum;
c. Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
d. Terselenggaranya pemantauan pengawasan terhadap barang bukti;
e. Terselenggaranya bantuan lidik sidik;
f. Strategis terwujudnya SDM Bareskrim yang kompeten;
g. Meningkatnya pemenuhan sarpras berbasis teknologi dan informasi;
h. Tersedianya data dan informasi yang handal dan user friendly;
i. Terwujudnya good governance dan clean government;
j. Terkelolanya anggaran yang akuntabel;
k. Pengawasan pengendalian yang melibatkan peran masyarakat.

Sasaran strategis Bareskrim Polri 2020-2024 tersebut digambarkan sebagai berikut:

Mengacu kepada sasaran Impact (SI) yaitu, "Tersedianya data dan informasi kriminal nasional yang handal dan *user friendly*", maka **sasaran strategis Pusiknas Bareskrim Polri 2020-2024** adalah:

a. Tersedianya produk layanan data dan informasi kriminal nasional yang valid dan terpercaya;
b. Terselenggaranya pengembangan sistem Piknas yang modern;
c. Terselenggaranya sinergitas antar Lembaga dalam pengelolaan data kriminal nasional;
d. Terselenggaranya analisis data kriminal Nasional yang akurat;
e. Terselenggaranya standarisasi arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional;
f. Terwujudnya SDM Pusiknas yang kompeten;

g. Meningkatkan ....

g. Meningkatnya pemenuhan sarpras Pusiknas Bareskrim Polri berbasis teknologi dan informasi;

h. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Terbuka dan Melayani;

i. Terkelolanya anggaran Satker Pusiknas Bareskrim Polri yang akuntabel;

j. Pengawasan pengendalian yang efektif.

Sasaran strategis Pusiknas Bareskrim Polri 2020-2024 tersebut digambarkan sebagai berikut:

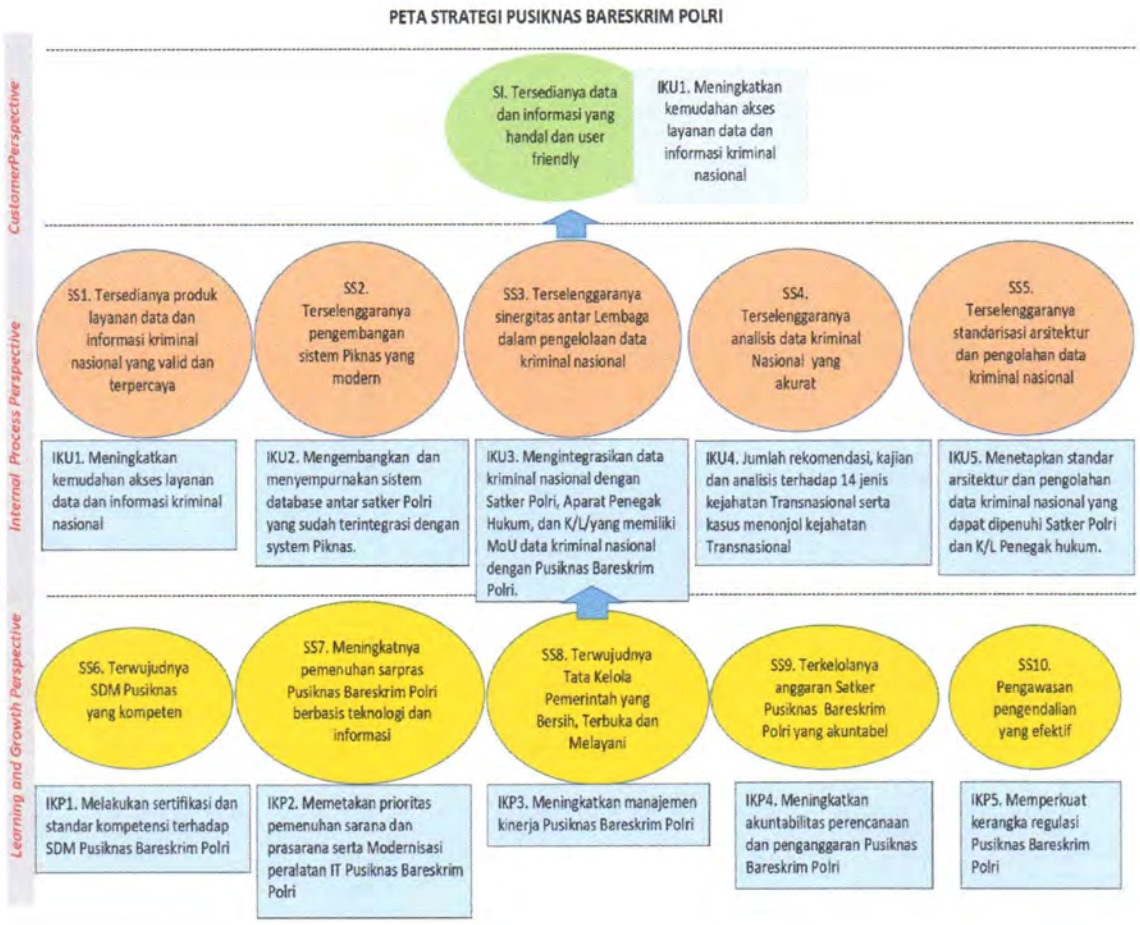

5. Hubungan .....

5. Hubungan keterkaitan Sasaran Strategis Pusiknas Bareskrim dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGI
1	Pengembangan sistem *big data* terintegrasi menuju *one data* kriminal nasional	Tersedianya produk layanan data dan informasi kriminal nasional yang valid dan terpercaya.
2	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi skala *enterprise* guna peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kriminal nasional	Terselenggaranya pengembangan sistem Piknas yang modern
3	Penguatan kerjasama internal dan eksternal Polri	Terselenggaranya sinergitas antar Lembaga dalam pengelolaan data kriminal nasional
4	Pemanfaatan sistem teknologi analitis pemutakhiran untuk mendukung penegakan hukum	Terselenggaranya analisis data kriminal Nasional yang akurat
5	Penetapan standardisasi data kriminal nasional	Terselenggaranya standardisasi arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional
6	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pusiknas Bareskrim Polri	Terwujudnya SDM Pusiknas yang kompeten
7	Peningkatan sarana dan prasarana Pusiknas Bareskrim Polri	Meningkatnya pemenuhan sarpras Pusiknas Bareskrim Polri berbasis teknologi dan informasi
8	Reformasi kelembagaan dan birokrasi Pusiknas Barskrim Polri	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Terbuka dan Melayani
9	Penguatan akuntabilitas kinerja Pusiknas Bareskrim Polri	Terkelolanya anggaran Satker Pusiknas Bareskrim Polri yang akuntabel
10	Penguatan regulasi dan pengawasan Pusiknas Bareskrim Polri	Pengawasan pengendalian yang efektif

6. Pentahapan ....

6. Pentahapan Kebijakan

a. Tahun 2020

Melakukan pengembangan sistem *predictive analytics* berbasis *advanced statistics.* Meningkatkan integrasi data kasus dan pelaku dengan Satker Polri, Aparat Penegak Hukum, dan K/L terkait. Serta, melakukan peningkatan infrastruktur.

b. Tahun 2021

Meningkatkan pengembangan sistem *big data* kriminalitas didukung *machine learning dan artificial intelligence* dan pengembangan *eLibrary* Kriminal Nasional. Meningkatkan integrasi data kasus, pelaku, dan korban dengan Satker Polri, Aparat Penegak Hukum dan K/L terkait, serta meningkatkan integrasi data berbasis multimedia.

c. Tahun 2022

Melakukan pengembangan sistem *deep analytics* untuk mendukung *pattern, text, image & video analytics*, dan pengembangan digital media. Melakukan pengembangan dan integrasi API pertukaran data berbasis *microservices* dengan Satker Polri, Aparat Penegak Hukum dan K/L terkait. Serta, melakukan pengembangan *data center.*

d. Tahun 2023

Melakukan pengembangan sistem *prescriptive analytics* untuk penurunan tingkat kriminal nasional, pengembangan dan integrasi API pertukaran data berbasis AI untuk pencarian data kriminal dengan Satker Polri, Aparat Penegak Hukum, dan K/L terkait. Serta, melakukan *pengembangan Disaster Recovery Center (DRC).*

e. Tahun 2024 .....

e. Tahun 2024

Melakukan pengembangan sistem *stream analytics* untuk *audio visual* berbasis *Internet of Thins (IoT)*, pengembangan dan integrasi *stream data audio visual* berbasi IoT dengan Satker Polri, Aparat Penegak Hukum, dan K/L terkait. Serta, melakukan pengembangan infrastruktur untuk *data streaming*.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ 05 /II/2021/PUSIKNAS
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PUSIKNAS BARESKRIM POLRI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri

Titik hubung dari sasaran, arah kebijakan dan strategis dalam agenda pembangunan ke-7, kedudukan Polri terletak pada Kegiatan Prioritas (KP) di:

a. Keamanan Dalam Negeri;
b. Keamanan Laut;
c. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
d. Keamanan Siber.

Polri juga berkontribusi pada penegakan hukum yang berkaitan dengan *Restoratif Justice* dan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Sedangkan titik hubungnya dapat dilihat dari arah kebijakan dan strategi Polri hingga ke level Proyek Prioritas Nasional serta keterkaitannya dengan tugas dan fungsi yang dipunyai oleh Polri dapat digambarkan kedalam Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Polri.

Adapun Sasaran Strategis Polri adalah sebagai berikut:

a. Sasaran strategis **"Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   1) Peningkatan kehadiran Polri pada 187 Lokasi Prioritas (Lokpri) dan 21 Pos Lintas Batas Negara (PLBN);

      Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:
      a) Meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada wilayah Lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
      b) Meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN (darat dan laut).

2) Pencegahan .....

2) Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;

b) Melakukan Lidikpamgal dengan fokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

c) Meningkatkan efektivitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

d) Memperkuat sistem manajemen pengamanan obyek vital nasional dan obyek vital lainnya.

3) Peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;

b) Menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara.

4) Peningkatan keamanan Laut;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di laut;

b) Memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;

c) Meningkatkan Penegakkan Hukum diwilayah perairan NKRI.

5) Peningkatan .....

5) Peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintasdijalan raya;

b) Peningkatan kualitas Penerangan dan Pendidikan tertib lalu lintas;

c) Mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintasdari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri.

6) Peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b) Menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;

c) *Partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan "keadilan restoratif serta peran mediasi" setiap konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas.

b. Sasaran strategis "Layanan publik Polri yang prima" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Meningkatkan inovasi pelayanan publik Polri;

2) Meningkatkan pelayanan data dan informasi Kriminal Nasional melalui Akses yang mudah;

3) Meningkatkan .....

3) Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

c. Sasaran strategis **"Penegakan Hukum secara Berkeadilan"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) Peningkatan pengungkapan 4 jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
b) Melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
c) Meningkatkan kerjasama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan;
d) Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkaratindak pidana 4 jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik.
e) Peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation).

2) Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Mengintegrasikan sistem data dan informasi criminal antarsatker Polri dan aparat penegak hukum;
b) Standarisasi data kriminal nasional;
c) Mengembangkan sistem informasi criminal nasional yang terintegrasi.

3) Pemetaan .....

3) Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;

b) Melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.

d. Sasaran strategis **"Profesionalisme SDM"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas SDM Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;

b) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri;

c) Meningkatkan kesejahteraan SDM.

2) Pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara baru.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Melakukan pendataan personel Mabes Polri yang akan pindah ke Ibu Kota Negara baru;

b) Menyusun roadmap pemindahan personel Mabes Polri ke Ibu Kota Negara baru.

e. Sasaran strategis **"Modernisasi teknologi"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Modernisasi Sarana dan Prasarana Polri.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-2024 termasuk kebutuhan di Ibu Kota Negara baru;

b) Modernisasi Sarana dan Prasarana operasional guna mendukung pelayanan Polri;

c) Modernisasi .....

c) Modernisasi kapal kelas A-1 dengan ukuran Panjang 90-95 M dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Drone;

d) Membangun Big Data/Single Data Entry Polri;

e) Membangun smart security di Ibu Kota Negara baru.

f. Sasaran strategis **"Efektifitas operasional"** dicapai dengan kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;

b) Mengembangkan Manajemen Operasi Kepolisian (Perencanan, Pelaksanaan dan Pengawasan).

2) Peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen Media.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;

b) Menetralisir berita negatif yang dapat mengganggu Kamtibmas.

3) Penguatan Sistem Informasi Polri berbasis "Big Data Polri". Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;

b) Mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;

c) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.

g. Sasaran.....

g. Sasaran strategis **"Good governance dan clean government"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut : Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal;
2) Membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
3) Meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek.

h. Sasaran strategis **"Akuntabilitas pengelolaan anggaran"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Penguatan akuntabilitas kinerja Polri.

   Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

   a) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polri;
   b) Menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polri.

2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri.

   Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

   a) Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polri;
   b) Menyusun LKIP Polri.

i. Sasaran strategis **"Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Penguatan regulasi Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a) Memperkuat kerangka regulasi Polri;
b) Memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.

2. Arah .....

2. Arah Kebijakan dan Strategi Bareskrim

a. Sasaran strategis **"Terwujudnya Penegakkan hukum secara berkeadilan"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan pengungkapan 4 jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan adalah:

(a) Meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;

(b) Melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;

(c) Meningkatkan kerjasama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan;

(d) Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik.

(e) peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*).

2) Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah:

(a) Mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum;

(b) Standarisasi data kriminal nasional;

(c) Mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi.

3) Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

(a) Memperkuat .....

(a) Memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;

(b) Melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.

b. Sasaran strategis **"Meningkatnya pelayanan publik dalam penegakan hukum"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

1) Meningkatkan inovasi pelayanan Polri;
2) Meningkatkan pendekatan personal dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Sasaran strategis **"Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana secara transparan;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
2) Meningkatkan kerjasama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan;
3) Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara pidana 4 jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi *public*;
4) Melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri.

d. Sasaran strategis **"Terselenggaranya pemantauan pengawasan terhadap barang bukti"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Akuntabilitas tahanan dan barang bukti;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

1) Transparansi pengelolaan barang bukti;
2) Melaksanakan perawatan tahanan yang sesuai aturan.

e. Sasaran .....

e. Sasaran strategis **"Terselenggaranya bantuan lidik sidik"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan pengungkapan kasus melalui pembuktian ilmiah;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

(a) Melengkapi peralatan laboratorium forensik dengan teknologi terkini.

(b) Meningkatkan cakupan data identitas forensik kependudukan.

(c) Peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*).

2) Pemberian bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan bantuan pembinaan terhadap PPNS Kementerian Lembaga.

f. Sasaran strategis **"Terwujudnya SDM Bareskrim yang kompeten"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan kualitas SDM Bareskrim Polri;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

1) Melakukan reformasi pengelolaan SDM secara professional;
2) Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Polri;
3) Meningkatkan kesejahteraan SDM;

g. Sasaran strategis **"Meningkatnya pemenuhan sarpras berbasis teknologi dan informasi"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Modernisasi sarana dan prasarana Bareskrim Polri;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

1) Memetakan prioritas dan kebutuhan sarana dan prasarana;
2) Modernisasi Sarana dan Prasaran operasional dan pelayanan Bareskrim Polri.

h. Sasaran .....

h. Sasaran strategis **"Tersedianya data dan informasi yang handal dan *user friendly*"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Penguatan sistem informasi Bareskrim Polri berbasis *big data*;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

1) Melakukan pemutakhiran data Bareskrim secara akurat dan tepat waktu;
2) Mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.

i. Sasaran strategis **"terwujudnya *good governance* dan *clean government*"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Bareskrim Polri;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

1) Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Bareskrim Polri yang andal;
2) Membangun sistem yang memastikan penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
3) Meningkatkan manajemen kinerja Bareskrim Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek.

j. Sasaran strategis **"Terkelolanya anggaran yang akuntabel"** dicapai dengan arah kebijakan sebaia berikut: Penguatan akuntabilitas kinerja Bareskrim Polri;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Bareskrim Polri.

k. Sasaran strategis **"pengawasan pengendalian yang melibatkan peran masyarakat"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Penguatan pengawasan di lingkungan Bareskrim Polri;

Untuk .....

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

1) Memperkuat pengawasan terhadap penyidik tindak pidana di Bareskrim Polri;
2) Memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusiknas Bareskrim Polri

Berikut adalah arah bijak dan strategi Pusiknas Bareskrim Polri yang diturunkan dari sasaran strategi :

a. Sasaran strategis "**Tersedianya produk layanan data dan informasi kriminal nasional yang valid dan terpercaya** dicapai dengan arah bijak sebagai berikut: Pengembangan sistem *big data* terintegrasi menuju *one data* kriminal nasional

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah Meningkatnya kemudahan akses layanan data dan informasi kriminal nasional.

b. Sasaran strategis "**Terselenggaranya pengembangan sistem Piknas yang modern**" dicapai dengan arah bijak sebagai berikut: Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi skala *enterprise* guna peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kriminal

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah: Mengembangkan dan menyempurnakan sistem database satker Polri yang sudah terintegrasi dengan sistem Piknas.

c. Sasaran strategis "**Terselenggaranya sinergitas antar Lembaga dalam pengelolaan data kriminal nasional**" dicapai dengan arah bijak sebagai berikut: Penguatan kerjasama internal dan eksternal Polri

Untuk .....

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah: Mengintegrasikan data kriminal nasional dengan Satker Polri, Aparat Penegak Hukum, dan K/L yang memiliki MOU data kriminal nasional dengan Pusiknas Bareskrim Polri.

d. Sasaran strategis "**Terselenggaranya analisis data kriminal Nasional yang akurat**" dicapai dengan arah bijak sebagai berikut: Pemanfaatan sistem teknologi analitis pemutakhiran untuk mendukung penegakan hukum

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah : Jumlah rekomendasi, kajian dan analisa terhadap 14 jenis kejahatan Transnasional serta kasus menonjol kejahatan transnasional.

e. Sasaran strategis "**Terselenggaranya standardisasi arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional**" dicapai dengan arah bijak sebagai berikut: Penetapan standardisasi data kriminal nasional

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah: Menetapkan standar arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional yang dapat dipenuhi Satker Polri dan K/L penegak hukum

f. Sasaran strategis "**Terwujudnya SDM Pusiknas yang kompeten**" dicapai dengan arah bijak sebagai berikut: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pusiknas Bareskrim Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah: Melakukan sertifikasi dan standar kompetensi terhadap SDM Pusiknas Bareskrim Polri.

g. Sasaran .....

g. Sasaran strategis **"Meningkatnya pemenuhan sarpras Pusiknas Bareskrim Polri berbasis Teknologi dan Informasi"** dicapai dengan arah bijak sebagai berikut: Peningkatan sarana dan prasarana Pusiknas Bareskrim Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah: Memetakan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana serta Modernisasi peralatan IT Pusiknas Bareskrim Polri.

h. Sasaran strategis "**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Terbuka dan Melayani**" dicapai dengan arah bijak sebagai berikut: Reformasi kelembagaan dan birokrasi Pusiknas Barskrim Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah: Meningkatkan manajemen kinerja Pusiknas Bareskrim Polri.

i. Sasaran strategis "**Terkelolanya anggaran Satker Pusiknas Bareskrim Polri yang akuntabel**" dicapai dengan arah bijak sebagai berikut: Penguatan akuntabilitas kinerja Pusiknas Bareskrim Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah: Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Pusiknas Bareskrim Polri.

j. Sasaran strategis "**Pengawasan pengendalian yang efektif**" dicapai dengan arah bijak sebagai berikut: Penguatan regulasi dan pengawasan Pusiknas Bareskrim Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah: Memperkuat kerangka regulasi Pusiknas Bareskrim Polri

4. Kerangka ....

4. Kerangka Regulasi

Pusiknas Bareskrim Polri dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat baik itu secara internal, maupun secara eksternal. Renstra Pusiknas Bareskrim Polri 2020-2024 ini merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan Polri yaitu Modernisasi Pelayanan Polri. Renstra Pusiknas Bareskrim Polri 2020-2024 juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran yang tersusun dalam kerangka regulasi. Selanjutnya, kerangka regulasi pada Renstra Pusiknas Bareskrim Polri 2020-2024 ini berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Pusiknas yang bersifat mengikat secara internal dan eksternal yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Renstra Polri 2020-2024.

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pusiknas Bareskrim Polri, kebutuhan regulasi Pusiknas dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institussi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
1	Perkap No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Informasi Kriminal.	a. Hasil identifikasi dan evaluasi belum valid; b. Hasil analisis perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana tertuang dalam UU No.2 tahun 2002 psl 15 huruf J. Tentang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; c. akan dijadikan peraturan tidak hanya untuk intern tetapi juga untuk mengatur ke luar.	Pusiknas Bareskrim Polri		Tahun 2021 Revisi Perkap menjadi Perpol (PP)

Perpol .....

1	2	3	4	5	6
2	Perpol No. 5 Tahun 2019 tanggal 5 Mei 2019 Tentang Perubahan Atas Perkap No. 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran XVIII : Bareskrim Polri)	a. Hasil analisa dan penyesuaian beban tugas pada Pusiknas Baresrim Polri b. Perlu adanya revisi tentang tupoksi Pusiknas Bareskrim Polri disesuiakan dengan fungsinya dalam rangka menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.	Pusiknas Bareskrim Polri		Tahun 2021 Revisi Perpol No. 5 Tahun 2019 tentang SOTK Polri terhadap Tupoksi Pusiknas Bareskrim Polri.
3	Peraturan tentang Standarisasi Data Kriminal Nasional	a. Hasil analisa dan evaluasi serta identifikasi masalah pendataan Data pada Pusiknas Bareskrim Polri; b. Pusiknas Bareskrim Polri sebagai pengolah, analisa dan penyaji data memerlukan peraturan yg dapat dijadikan pedoman baik utk K/L maupun aparat penegak hukum.	Pusiknas Bareskrim Polri	K/L dan Aparat Penegak Hukum	Tahun 2020 Penyusunan Standarisasi Data Kriminal Nasional.

5. Kerangka Kelembagaan

Peran kelembagaan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pusiknas Bareskrim Polri sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra 2020-2024, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan yang tepat agar seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Pusiknas Bareskrim Polri 2020-2024 dapat terlaksana sesuai target yang ditentukan. Kelembagaan diwujudkan dalam komposisi unit kerja (satker-satker) dan struktur hirarkhi yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi serta mandat organisasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelembagaan yang dibentuk ditingkat Polri disesuaikan dengan kebutuhan organisasi selama Renstra berlangsung dan memperhatikan ketepatan fungsi organisasi, ketepatan proses kerja (*business procces*) yang dibangun dengan unit kerja lainnya dan ketepatan ukuran (jumlah pengawakan organisasi yang disesuaikan dengan beban kerja). Dengan demikian organisasi bersifat sederhana, simpel dan lincah namun efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kebutuhan akan kelembagaan salah satunya didapat dari masukan satker sebagai pelaksana tugas dan fungsi.

Kelembagaan Pusiknas Bareskrim Polri perlu untuk disesuaikan dengan arahan presiden yang sudah tertuang dalam RPJMN yaitu birokrasi yang efektif. Birokrasi yang efektif merupakan hasil dari kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Oleh karena itu, revisi kelembagaan Pusiknas Bareskrim Polri akan dilakukan untuk mewujudkan organisasi Pusiknas Bareskrim Polri berkualitas, yang ditandai dengan: penguatan organisasi berupa penambahan tugas, fungsi dan struktur; penggabungan; pengembalian tugas dan fungsi; dan pembentukan organisasi/struktur baru.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Pusiknas Bareskrim Polri dalam rangka menghasilkan data dan informasi yang handal dan *user friendly*. Oleh karena itu penguatan kelembagaan Pusiknas Bareskrim Polri dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan kompetensi SDM untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Pusiknas Bareskrim Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.;

b. Peraturan .....

b. Peraturan perundangan yang berlaku, untuk memastikan keserasian antara tugas, fungsi, serta kewenangan yang berlaku di lingkungan Pusiknas Bareskrim Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku di Polri, maupun di tingkat nasional;

c. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;

d. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance* dan *clean government*), seperti prinsip tepat fungsi, tepat proses, tepat ukuran.

Dari keseluruhan hal-hal yang mempengaruhi perencanaan guna revisi kelembagaan Pusiknas Bareskrim Polri untuk tahun 2020-2024 kedepan, maka dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ 05 /II/2021/PUSIKNAS
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

No	Sasaran Strategis	Strategi	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tata kelola pemerintah yang bersih, terbuka dan melayani	Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Pusiknas	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (Program 11)						
			Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Kriminal Nasional (Kegiatan 5084)						
			Usulan perubahan organisasi Pusiknas Bareskrim Polri	Perubahan Subbidtarins-kerkom menjadi Subbidkorlak, Subbidtarneg menjadi Subbidanev		1 Naskah			
				Perubahan Subbidaplik menjadi Subbidsisinfo, Subbidjaring menjadi Subbidinfrasis		1 Naskah			
				Perubahan Bid PDAKT semula mengolah data kejahatan transnasional menjadi Bid ADIKRIM, melaksanakan analisis, pengkajian data dan statistik kriminal.		1 Naskah			
				Revisi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusiknas pada: Bidkerma, Bidbangsis Bidyaninfo dan Bid PDAKT		1 Naskah			

BAB IV .....

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ 05 /II/2021/PUSIKNAS
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Dalam rangka merealisasikan visi-misi Pusiknas Bareskrim Polri 2020-2024 serta mendukung arah kebijakan Bareskrim Polri, maka Pusiknas Bareskrim Polri menetapkan 5 tujuan yang disertai dengan 10 sasaran strategis. Dimana sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Pusiknas Bareskrim Polri. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP).

SASARAN STRATEGI		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Internal Process Perspective								
SS1	Tersedianya produk layanan data dan informasi kriminal nasional yang valid terpercaya	IKU1	Meningkatnya kemudahan akses layanan data dan informasi kriminal nasional;	1329 Lap.	1521 Lap.	1521 Lap	1521 Lap	1521 Lap
SS2	Terselenggaranya pengembangan sistem Piknas yang modern	IKU2	Mengembangkan dan menyempurnakan sistem database antar satker Polri yang sudah terintegrasi dengan system Piknas;	260 Lap.	182 Lap.	182 Lap.	182 Lap.	182 Lap.
SS3	Terselenggaranya sinergitas antar Lembaga dalam pengelolaan data kriminal nasional	IKU3	Mengintegrasikan data kriminal nasional dengan Satker Polri, Aparat Penegak Hukum, dan K/L/yang memiliki MoU data kriminal nasional dengan Pusiknas Bareskrim Polri	3 K/L	3 K/L	3 K/L	3 K/L	3 K/L
SS4	Terselenggaranya analisis data kriminal Nasional yang akurat	IKU4	Jumlah rekomendasi, kajian dan analisis terhadap 14 jenis kejahatan Transnasional serta kasus menonjol kejahatan transnasional	147 Lap.	150 Lap.	150 Lap.	150 Lap.	150 Lap.

Terselenggaranya .....

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ 05 /II/2021/PUSIKNAS
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

SASARAN STRATEGI		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS5	Terselenggaranya standarisasi arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional	IKU5	Menetapkan standar arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional yang dapat dipenuhi Satker Polri dan K/L penegak hukum.	10%	20%	30%	40%	50%
Learning and Growth Perspective								
SS6	Terwujudnya SDM Pusiknas yang kompeten	IKP1	Melakukan sertifikasi dan standar kompetensi terhadap SDM Pusiknas Bareskrim Polri	5%	6%	7%	8%	9%
SS7	Meningkatnya pemenuhan sarpras Pusiknas Bareskrim Polri berbasis teknologi dan informasi	IKP2	Memetakan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana serta Modernisasi peralatan IT Pusiknas Bareskrim Polri	10%	20%	30%	40%	50%
SS8	Terwujudnya Tata kelola pemerintah yang bersih, terbuka dan melayani	IKP3	Meningkatkan manajemen kinerja Pusiknas Bareskrim Polri	B	B	BB	BB	BB
SS9	Terkelolanya anggaran Satker Pusiknas Bareskrim Polri yang akuntabel	IKP4	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Pusiknas Bareskrim Polri	93,36	93,50	94,75	95,00	96,25
SS10	Pengawasan pengendalian yang efektif	IKP5	Memperkuat kerangka regulasi Pusiknas Bareskrim Polri	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan bahwa Program di lingkungan Pusiknas adalah Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Kriminal Nasional.

2. Kerangka.....

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, sasaran strategis Tersedianya data dan informasi yang valid terpercaya, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Pendanaan akan digunakan untuk fokus pada kepentingan untuk memberikan dukungan data dan informasi dalam penegakan hukum. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

NO	SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KET.
1	2	3	3	4
1	Tersedianya produk layanan data dan informasi kriminal nasional yang valid terpercaya	- Meningkatkan kemudahan akses layanan data dan informasi kriminal nasional	RM	
2	Terselenggaranya pengembangan sistem Piknas yang modern	- Mengembangkan dan menyempurnakan sistem database antar satker Polri yang sudah terintegrasi dengan sistem Piknas.	RM	
3	Terselenggaranya sinergitas sinergitas antar Lembaga dalam pengelolaan data kriminal nasional	- Mengintegrasikan data kriminal nasional dengan Satker Polri, Aparat Penegak Hukum, dan K/L/yang memiliki MoU data kriminal nasional dengan Pusiknas	RM	
4.	Terselenggaranya analisis data kriminal Nasional yang akurat	- Jumlah rekomendasi, kajian dan analis terhadap 14 jenis kejahatan Transnasional serta kasus menonjol kejahatan transnasional.	RM	
5	Terselenggaranya standardisasi arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional	- Menetapkan standar arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional yang dapat dipenuhi Satker Polri dan K/L penegak hukum.	RM	
6	Terwujudnya SDM Pusiknas yang kompeten	- Melakukan sertifikasi dan standar kompetensi terhadap SDM Pusiknas Bareskrim Polri	RM	

7. Meningkatkan .....

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ 05 /II/2021/PUSIKNAS
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KET.
1	2	3	3	4
7	Meningkatnya pemenuhan sarpras Pusiknas Bareskrim Polri berbasis Teknologi dan Informasi	- Memetakan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana serta Modernisasi peralatan IT Pusiknas Bareskrim Polri	RM	
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Terbuka dan Melayani	- Meningkatkan manajemen kinerja Pusiknas Bareskrim Polri	RM	
9	Terkelolanya anggaran Satker Pusiknas Bareskrim Polri yang akuntabel	- Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Pusiknas Bareskrim Polri	RM	
10	Pengawasan pengendalian yang efektif	- Memperkuat kerangka regulasi Pusiknas Bareskrim Polri	RM	

BAB V.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/ 05 /II/2021/PUSIKNAS
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Pusiknas Bareskrim Polri tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Pusiknas Bareskrim Polri, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polri dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh jajaran dan personel Pusiknas Bareskrim Polri sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana

a. Mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan negara (Polri) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskrimininasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;

b. Pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing*;

c. Mengedepankan strategi *community policing*. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;

d. Selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentifikasi .....

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
NOMOR : KEP/05/II/2021/PUSIKNAS
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

2. Autentifikasi dan distribusi.

a. Autentifikasi Renstra Pusiknas Bareskrim Polri berikut merupakan jabaran dari Renstra Polri, Renstra Bareskrim Polri dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang telah disahkan oleh Kapusiknas Bareskrim Polri sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;

b. Distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Jakarta, Februari 2021

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SATKER PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
TAHUN 2020 - 2024

NO.	KINERJA	JUMLAH KOMPONEN/ KEGIATAN	TARGET KINERJA					KET.
			T.A. 2020	T.A. 2021	T.A. 2022	T.A. 2023	T.A. 2024	
060.01.15	**Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri**		**212,020,159,000**	**206,754,959,000**	**142,580,367,000**	**117,580,367,000**	**92,580,367,000**	**RM**
3084.997	**Peralatan dan Fasilitas Perkantoran**	1	**203,676,251,000**	**198,411,051,000**	**125,000,000,000**	**100,000,000,000**	**75,000,000,000**	
	- Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi		203,676,251,000	198,411,051,000	125,000,000,000	100,000,000,000	75,000,000,000	
5059	**Dukungan Manajemen Dan Teknik Sarpras**	1	**8,343,908,000**	**8,343,908,000**	**17,580,367,000**	**17,580,367,000**	**17,580,367,000**	**RM**
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10		488,000,000	388,000,000	388,000,000	388,000,000	388,000,000	
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2		56,000,000	66,500,000	66,500,000	66,500,000	66,500,000	
	Pemeliharaan Peralatan Kantor		84,320,000	84,320,000	84,320,000	84,320,000	84,320,000	
	Pemeliharaan Peralatan Fungsional berupa Penggantian, Perbaikan dan Perawatan 'Peralatan Fungsional Sistem PIKNAS dan CMIS		7,715,588,000	7,805,088,000	17,041,547,000	17,041,547,000	17,041,547,000	
060.01.18	**PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**	1741	**7,485,691,000**	**7,485,691,000**	**11,723,036,000**	**11,723,036,000**	**11,723,036,000**	**RM**
3137	**Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan danpenyidikan**	1	**7,485,691,000**	**7,485,691,000**	**11,723,036,000**	**11,723,036,000**	**11,723,036,000**	
3137.994	Layanan Perkantoran		6,058,911,000	6,058,911,000	7,234,410,000	7,234,410,000	7,234,410,000	
	(Satuan : Bulan Layanan)	1						
5084	**Penyelenggaraan Informasi Kriminal Nasional**	1741	**1,426,780,000**	**1,426,780,000**	**4,488,626,000**	**4,488,626,000**	**4,488,626,000**	
5084.001	Layanan Pembinaan dan Penyajian Informasi Kriminal Nasional		1,426,780,000	1,426,780,000	4,488,626,000	4,488,626,000	4,488,626,000	
	(Satuan : Laporan)	1741						
	JUMLAH		**219,505,850,000**	**214,240,650,000**	**154,303,403,000**	**129,303,403,000**	**104,303,403,000**	

Jakarta, 2 Februari 2021

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H.,M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN PENGADAAN MATERIIL/PERALATAN SUMBER PENDANAAN RUPIAH MURNI (RM)
SATKER PUSIKNAS BARESKRIM POLRI T.A. 2020-2024

NO	KELOMPOK SASARAN	2020					2021					2022					2023					2024					KETERANGAN
		KEBUTUHAN			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KEBUTUHAN			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KEBUTUHAN			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KEBUTUHAN			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KEBUTUHAN			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	
		MAKSIMUM (Unit)	OPTIMUM (Unit)	MINIMUM (Unit)			MAKSIMUM (Unit)	OPTIMUM (Unit)	MINIMUM (Unit)			MAKSIMUM (Unit)	OPTIMUM (Unit)	MINIMUM (Unit)			MAKSIMUM (Unit)	OPTIMUM (Unit)	MINIMUM (Unit)			MAKSIMUM (Unit)	OPTIMUM (Unit)	MINIMUM (Unit)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	PERANGKAT KERAS SISTEM PIKNAS (INFRASTRUKTUR)					150,000,000,000					150,000,000,000					125,000,000,000					100,000,000,000					75,000,000,000	Satker PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
	a. Data Center:					40,000,000,000				-	40,000,000,000				-	35,000,000,000					30,000,000,000				-	25,000,000,000	
	1) Utility									-					-										-		
	2) Ruang Utility																										
	3) Ruang Data Center																										
	b. Infrastruktur					60,000,000,000					60,000,000,000					50,000,000,000					40,000,000,000					30,000,000,000	
	1) Server																										
	2) Storage																										
	3) GPU																										
	4) Repeater Satelit																										
	c. Perangkat Kewilayahan					50,000,000,000					50,000,000,000					40,000,000,000					30,000,000,000					20,000,000,000	
	1) Laptop / PC (Input Data LP)																										
	2) Laptop / PC (Input Isian Data Kasus)																										
	3) Modem																										
2	JARINGAN					10,000,000,000					10,000,000,000					10,000,000,000					10,000,000,000					10,000,000,000	
	a. Perangkat Jaringan																										
	b. Perangkat Keamanan Jaringan																										
3	PERANGKAT LUNAK PENGUMPULAN DATA SISTEM PIKNAS					280,000,000,000					280,000,000,000					240,000,000,000					210,000,000,000					170,000,000,000	
	a. Perangkat Lunak Pengumpulan Data				-	100,000,000,000				-	100,000,000,000				-	80,000,000,000				-	60,000,000,000				-	30,000,000,000	
	1) Perangkat Sistem Integrasi (Enterprise Service Bus)																										
	2) Perangkat Sistem Transaksional (Enterprise Service Bus)																										
	3) Engine Crawling																										
	4) Perangkat Digital Arsip																										
	5) Protocol Communication																										
	b. Perangkat Lunak Pengolahan Data					40,000,000,000				-	40,000,000,000				-	40,000,000,000				-	40,000,000,000				-	40,000,000,000	
	1) Database																										
	2) Data Warehouse																										
	3) Analytical Neural Network																										
	c. Perangkat Lunak Analisa Data					100,000,000,000					100,000,000,000					90,000,000,000					70,000,000,000					60,000,000,000	
	1) Artificial Intelligence																										
	2) Analyst Notebook																										
	3) Deep Learning																										
	4) Machine Learning																										
	5) Spider Analysist																										
	d. Perangkat Lunak Penyajian Data					40,000,000,000					40,000,000,000					40,000,000,000					40,000,000,000					40,000,000,000	
	1) Business Intelligence																										
	2) Geospatial Information System																										
	3) Virual Artificial Intelligence																										

4. Aplikasi .....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4	**APLIKASI SISTEM PIKNAS**					40,000,000,000					40,000,000,000					40,000,000,000					40,000,000,000					40,000,000,000	
	a. Monitoring Pengumpulan Data																										
	b. Monitoring Pengolahan Data																										
	c. Monitoring Analisis Data																										
	d. Monitoring Penyajian Data																										
5	**COMMAND CENTER**					50,000,000,000					80,000,000,000					30,000,000,000					20,000,000,000					10,000,000,000	
	a. Ruangan dan Perangkat Kepala Operasional Command Center																										
	b. Ruangan dan Perangkat Cube Analis																										
	c. Ruangan dan Perangkat Konsultan Sistem Informasi																										
	d. Ruangan dan Perangkat Konsultan Infrastruktur dan Jaringan																										
	e. Ruangan dan Perangkat Maintenance dan Facility																										
	f. Ruangan dan Perangkat Operator Server																										
	g. Ruangan dan Perangkat Helpdesk																										
	h. Ruangan dan Perangkat Multimedia																										
	i. Ruangan dan Perangkat Kontrol/kendali																										
	j Ruangan dan Perangkat Pelayanan Publik)																										
	k. Ruangan dan Perangkat Rest Room																										
	l. Ruangan dan Perangkat Resepsionis																										
	m. Ruangan dan Perangkat Tunggu																										
	n. Ruangan dan Perangkat CCTV																										
	o. Ruangan dan Perangkat Security Network (NOC)																										
	p. Ruangan dan Perangkat Training																										
	TOTAL					530,000,000,000					560,000,000,000					445,000,000,000					380,000,000,000					305,000,000,000	

Keterangan:

1. *Maksimum* adalah kebutuhan ideal yang harus dicukupi
2. *Optimum* adalah kebutuhan yang sudah berdasarkan selektif prioritas
3. *Minimum* adalah Kebutuhan yang mutlak harus diusulkan/diadakan

Jakarta, Februari 2021

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H.,M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 31 Mei 2021

Nomor : B/ 100 /V/REN./2021/Pusiknas
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : satu berkas
Perihal : revisi lampiran rencana kebutuhan materiil/ peralatan Renstra Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2020-2024

Kepada

Yth. ASISTEN KAPOLRI
BIDANG
PERENCANAAN DAN
ANGGARAN

di

Jakarta

1. Rujukan:
   a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-060.01.1.678164/2021 tanggal 23 November 2020 tentang DIPA Pusiknas Polri T.A. 2021;
   b. Rencana Kegiatan Pusiknas Bareskrim Polri T.A. 2021;
   c. Nota Dinas Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/335/V/REN./2021/Rorenmin tanggal 10 Mei 2021 perihal pengiriman hasil tim audit Itwasum Polri

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal hasil temuan Wasrik Itwasum Polri Tahap I aspek Organisasi dan Perencanaan Tahun 2021 bahwa pada Renstra Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2020-2024 dalam renbut pengadaan materiil/peralatan belum terperinci terhadap jumlah kebutuhan alat yang dibutuhkan.

3. Berkaitan dengan hal tersebut, dikirimkan penambahan lampiran pada jumlah peralatan di rencana kebutuhan materiil/ peralatan, sebagaimana terlampir.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H. M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

Kabareskrim Polri.

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN PENGADAAN MATERIIL/PERALATAN SUMBER PENDANAAN RUPIAH MURNI (RM)
SATKER PUSIKNAS BARESKRIM POLRI T.A. 2020-2024

NO	KELOMPOK SASARAN	2020					2021					2022					2023					2024					KETERANGAN
		KEBUTUHAN			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KEBUTUHAN			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KEBUTUHAN			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KEBUTUHAN			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KEBUTUHAN			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	
		MAKSIMUM (Unit)	OPTIMUM (Unit)	MINIMUM (Unit)			MAKSIMUM (Unit)	OPTIMUM (Unit)	MINIMUM (Unit)			MAKSIMUM (Unit)	OPTIMUM (Unit)	MINIMUM (Unit)			MAKSIMUM (Unit)	OPTIMUM (Unit)	MINIMUM (Unit)			MAKSIMUM (Unit)	OPTIMUM (Unit)	MINIMUM (Unit)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	**PERANGKAT KERAS SISTEM PIKNAS (INFRASTRUKTUR)**					**150,000,000,000**					**150,000,000,000**					**125,000,000,000**					**100,000,000,000**					**75,000,000,000**	**Satker PUSIKNAS BARESKRIM POLRI**
	a. Data Center					40,000,000,000				-	40,000,000,000				-	35,000,000,000				30,000,000,000				-	25,000,000,000	
	1) Utility	24	20	12	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		21	18	11	1,000,000,000		18	15	9	1,000,000,000		16	13	8	1,000,000,000		
	2) Ruang Utility	18	15	9	1,000,000,000		18	15	9	1,000,000,000		16	13	8	1,000,000,000		14	11	7	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		
	3) Ruang Data Center	6	5	2	1,000,000,000		6	5	2	1,000,000,000		5	4	2	1,000,000,000		5	4	2	1,000,000,000		4	3	1	1,000,000,000		
	b. Infrastruktur					60,000,000,000					60,000,000,000					50,000,000,000				40,000,000,000					30,000,000,000	
	1) Server	48	40	20	1,000,000,000		48	40	20	1,000,000,000		40	33	17	1,000,000,000		33	28	14	1,000,000,000		28	23	12	1,000,000,000		
	2) Storage	18	15	8	1,000,000,000		18	15	8	1,000,000,000		15	13	6	1,000,000,000		13	10	5	1,000,000,000		10	9	4	1,000,000,000		
	3) GPU	4	3	1	1,000,000,000		4	3	1	1,000,000,000		3	3	1	1,000,000,000		3	2	1	1,000,000,000		2	2	1	1,000,000,000		
	4) Repeater Satelit	2	2	1	1,000,000,000		2	2	1	1,000,000,000		2	2	1	1,000,000,000		2	1	1	1,000,000,000		1	1	1	1,000,000,000		
	c. Perangkat Kewilayahan					50,000,000,000					50,000,000,000					40,000,000,000				30,000,000,000					20,000,000,000	
	1) Laptop / PC (Input Data LP)	19	16	13	1,000,000,000		19	16	13	1,000,000,000		15	13	10	1,000,000,000		12	10	8	1,000,000,000		10	8	7	1,000,000,000		
	2) Laptop / PC (Input Isian Data Kasus)	36	30	24	1,000,000,000		36	30	24	1,000,000,000		29	24	19	1,000,000,000		23	19	15	1,000,000,000		18	15	12	1,000,000,000		
	3) Modem	5	4	3	1,000,000,000		5	4	3	1,000,000,000		4	3	3	1,000,000,000		3	3	2	1,000,000,000		2	2	2	1,000,000,000		
2	**JARINGAN**					**10,000,000,000**					**10,000,000,000**					**10,000,000,000**				**10,000,000,000**					**10,000,000,000**	
	a. Perangkat Jaringan	5	4	2	1,000,000,000		5	4	2	1,000,000,000		5	4	2	1,000,000,000		5	4	2	1,000,000,000		5	4	2	1,000,000,000		
	b. Perangkat Keamanan Jaringan	7	6	4	1,000,000,000		7	6	4	1,000,000,000		7	6	4	1,000,000,000		7	6	4	1,000,000,000		7	6	4	1,000,000,000		
3	**PERANGKAT LUNAK PENGUMPULAN DATA SISTEM PIKNAS**					**280,000,000,000**					**280,000,000,000**					**240,000,000,000**				**210,000,000,000**					**170,000,000,000**	
	a. Perangkat Lunak Pengumpulan Data				-	100,000,000,000				-	100,000,000,000				-	80,000,000,000				60,000,000,000				-	30,000,000,000	
	1) Perangkat Sistem Integrasi (Enterprise Service Bus)	30	25	15	1,000,000,000		30	25	15	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		19	16	10	1,000,000,000		15	13	8	1,000,000,000		
	2) Perangkat Sistem Transaksional (Enterprise Service Bus)	30	25	15	1,000,000,000		30	25	15	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		19	16	10	1,000,000,000		15	13	8	1,000,000,000		
	3) Engine Crawling	24	20	12	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		19	16	10	1,000,000,000		15	13	8	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		
	4) Perangkat Digital Arsip	24	20	12	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		19	16	10	1,000,000,000		15	13	8	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		
	5) Protocol Communication	12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		10	8	5	1,000,000,000		8	6	4	1,000,000,000		6	5	3	1,000,000,000		
	b. Perangkat Lunak Pengolahan Data					40,000,000,000				-	40,000,000,000				-	40,000,000,000				-	40,000,000,000				-	40,000,000,000	
	1) Database	12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		
	2) Data Warehouse	24	20	12	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		
	3) Analytical Neural Network	12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		
	c. Perangkat Lunak Analisa Data					100,000,000,000					100,000,000,000					80,000,000,000				70,000,000,000					60,000,000,000	
	1) Artificial Intelligence	24	20	12	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		19	16	10	1,000,000,000		17	14	8	1,000,000,000		15	12	7	1,000,000,000		
	2) Analyst Notebook	24	20	12	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		19	16	10	1,000,000,000		17	14	8	1,000,000,000		15	12	7	1,000,000,000		
	3) Deep Learning	24	20	12	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		19	16	10	1,000,000,000		17	14	8	1,000,000,000		15	12	7	1,000,000,000		
	4) Machine Learning	24	20	12	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		19	16	10	1,000,000,000		17	14	8	1,000,000,000		15	12	7	1,000,000,000		
	5) Spider Analysist	24	20	12	1,000,000,000		24	20	12	1,000,000,000		19	16	10	1,000,000,000		17	14	8	1,000,000,000		15	12	7	1,000,000,000		
	d. Perangkat Lunak Penyajian Data					40,000,000,000					40,000,000,000					40,000,000,000				40,000,000,000					40,000,000,000	
	1) Business Intelligence	18	15	9	1,000,000,000		18	15	9	1,000,000,000		18	15	9	1,000,000,000		18	15	9	1,000,000,000		18	15	9	1,000,000,000		
	2) Geospatial Information System	18	15	9	1,000,000,000		18	15	9	1,000,000,000		18	15	9	1,000,000,000		18	15	9	1,000,000,000		18	15	9	1,000,000,000		
	3) Virtual Artificial Intelligence	12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		

4 Aplikasi ....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4	**APLIKASI SISTEM PIKNAS**					**40,000,000,000**					**40,000,000,000**					**40,000,000,000**					**40,000,000,000**					**40,000,000,000**	
	a. Monitoring Pengumpulan Data	12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		
	b. Monitoring Pengolahan Data	12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		
	c. Monitoring Analisis Data	12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		
	d. Monitoring Penyajian Data	12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		12	10	6	1,000,000,000		
5	**COMMAND CENTER**					**50,000,000,000**					**80,000,000,000**					**30,000,000,000**					**20,000,000,000**					**10,000,000,000**	
	a. Ruangan dan Perangkat Kepala Operasional Command Center	4	3	2	1,000,000,000		6	3	2	1,000,000,000		2	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		
	b. Ruangan dan Perangkat Cube Analis	2	2	1	1,000,000,000		4	2	1	1,000,000,000		1	2	1	1,000,000,000		1	2	1	1,000,000,000		0	2	1	1,000,000,000		
	c. Ruangan dan Perangkat Konsultan Sistem Informasi	2	2	1	1,000,000,000		4	2	1	1,000,000,000		1	2	1	1,000,000,000		1	2	1	1,000,000,000		0	2	1	1,000,000,000		
	d. Ruangan dan Perangkat Konsultan Infrastruktur dan Jaringan	2	2	1	1,000,000,000		4	2	1	1,000,000,000		1	2	1	1,000,000,000		1	2	1	1,000,000,000		0	2	1	1,000,000,000		
	e. Ruangan dan Perangkat Maintenance dan Facility	4	3	2	1,000,000,000		6	3	2	1,000,000,000		2	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		
	f. Ruangan dan Perangkat Operator Server	4	3	2	1,000,000,000		6	3	2	1,000,000,000		2	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		
	g. Ruangan dan Perangkat Helpdesk	4	3	2	1,000,000,000		6	3	2	1,000,000,000		2	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		
	h. Ruangan dan Perangkat Multimedia	4	3	2	1,000,000,000		6	3	2	1,000,000,000		2	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		
	i. Ruangan dan Perangkat Kontrol/kendali	5	4	2	1,000,000,000		8	4	2	1,000,000,000		3	4	2	1,000,000,000		2	4	2	1,000,000,000		1	4	2	1,000,000,000		
	j. Ruangan dan Perangkat Pelayanan Publik)	4	3	2	1,000,000,000		6	3	2	1,000,000,000		2	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		
	k. Ruangan dan Perangkat Rest Room	2	2	1	1,000,000,000		4	2	1	1,000,000,000		1	2	1	1,000,000,000		1	2	1	1,000,000,000		0	2	1	1,000,000,000		
	l. Ruangan dan Perangkat Resepsionis	4	3	2	1,000,000,000		6	3	2	1,000,000,000		2	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		1	3	2	1,000,000,000		
	m. Ruangan dan Perangkat Tunggu	2	2	1	1,000,000,000		4	2	1	1,000,000,000		1	2	1	1,000,000,000		1	2	1	1,000,000,000		0	2	1	1,000,000,000		
	n. Ruangan dan Perangkat CCTV	6	5	3	1,000,000,000		10	5	3	1,000,000,000		4	5	3	1,000,000,000		2	5	3	1,000,000,000		1	5	3	1,000,000,000		
	o. Ruangan dan Perangkat Security Network (NOC)	6	5	3	1,000,000,000		10	5	3	1,000,000,000		4	5	3	1,000,000,000		2	5	3	1,000,000,000		1	5	3	1,000,000,000		
	p. Ruangan dan Perangkat Training	6	5	3	1,000,000,000		10	5	3	1,000,000,000		4	5	3	1,000,000,000		2	5	3	1,000,000,000		1	5	3	1,000,000,000		
	TOTAL					**630,000,000,000**					**560,000,000,000**					**440,000,000,000**					**380,000,000,000**					**305,000,000,000**	

Keterangan:

1. *Maksimum* adalah kebutuhan ideal yang harus dicukupi
2. *Optimum* adalah kebutuhan yang sudah berdasarkan selektif prioritas
3. *Minimum* adalah Kebutuhan yang mutlak harus diusulkan/diadakan

Jakarta, 31 Mei 2021

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI